



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2021**

**DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN  
DITJEN PERKERETAAPIAN**

**JAKARTA, 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2021 ini disusun sebagai tahun terakhir dan berkelanjutan serta penyesuaian dari Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan ini memuat kebijakan dan pembinaan di unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 disamping dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang baik.

## DAFTAR ISI

<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>2. KONDISI SAAT INI.....</b>	<b>6</b>
2.1. Kondisi Umum.....	6
2.2. Realisasi Program Pembangunan .....	8
2.3. Permasalahan dan Tantangan.....	12
<b>3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 - 2020.....</b>	<b>14</b>
3.1. Visi dan Misi .....	14
3.2. Tujuan.....	14
3.4. Target Fisik 2020 – 2024 .....	15
<b>4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 .....</b>	<b>17</b>
4.1. Sasaran.....	17
4.2. Strategi.....	17
4.3. Arah Kebijakan.....	18
4.4. Program Pembangunan.....	18
4.5. Kegiatan Pembangunan.....	19
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>25</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Fisik Program Kegiatan 2015- 2017 .....	15
Tabel 2	Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan 2015- 2017 .....	16
Tabel 3	Capaian Output Bidang Keselamatan Perkeretaapian .....	19
Tabel 4	Target Fisik Program Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan.....	20
Tabel 4	Target Fisik Program Audit dan Inspeksi Keselamatan .....	21
Tabel 5	Target Fisik Program Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan .....	22
Tabel 6	Target Fisik Program Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan .....	23
Tabel 7	Target Fisik Program Pencegahan dan Penegakan Hukum .....	24
Tabel 8	Target Fisik Program Peningkatan Kinerja dan Kajian Kebijakan KA ....	25

## 1. PENDAHULUAN

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang telah disusun unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, maka sesuai tugas pokok dan fungsi serta penyesuaian kewenangan, disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021 yang kemudian merumuskan prioritas-prioritas kebijakan dan pembangunan tahun 2021 serta sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda kebijakan dan pembangunan Ditjen Perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 memuat kebijakan pembangunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan pendanaan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2021 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. KONDISI SAAT INI

### 2.1. KONDISI UMUM

Seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi Indonesia, maka pergerakan manusia dan barang pun ikut mengalami peningkatan. Peningkatan pergerakan tersebut harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Transportasi perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memegang peranan penting dalam melayani pergerakan penumpang dan barang diharapkan dapat menjadi tulang punggung angkutan darat. Berbagai kelebihan angkutan kereta api dibandingkan dengan moda lain diantaranya adalah daya angkut yang besar baik dalam satuan jumlah penumpang maupun barang (ton), pemakaian energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan.

Namun kondisi perkeretaapian di Indonesia saat ini yang jaringannya sebagian besar masih merupakan peninggalan jaman pemerintahan Belanda sangat membutuhkan penanganan yang khusus dan intensif. Berbagai keunggulan moda kereta api diatas belum dapat dioptimalkan, hal tersebut terlihat dengan masih rendahnya share angkutan penumpang maupun barang.

Dari uraian diatas dapat diperoleh gambaran bahwa moda transportasi kereta api baik angkutan penumpang maupun barang masih kurang kontribusinya dibandingkan dengan moda lainnya. Angkutan barang masih didominasi oleh transportasi darat (truk) dan laut. Keterbatasan transportasi kereta api adalah kurangnya aksesibilitas jaringan menuju pelabuhan sebagai simpul utama barang ekspor/impor. Dengan mengalihkan angkutan barang ke kereta api, maka diharapkan dapat mengurangi beban jalan raya.

Untuk angkutan KA penumpang perkotaan (lokal) saat ini menjadi “primadona” di wilayah Jabotabek terutama yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah penyangga DKI Jakarta yaitu Tangerang, Serpong, Bogor, Bekasi. Program pengembangan angkutan KA perkotaan menjadi prioritas dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota-kota besar/metropolitan.

Lebih lanjut program tersebut diarahkan untuk kota besar (berpenduduk di atas 3 juta) lainnya seperti Bandung, Surabaya dan Yogyakarta. Dengan layanan kereta api urban bertenaga listrik yang terintegrasi intra dan antar moda dengan moda jalan. Layanan bisa berupa kereta komuter dari sub-urban ke pusat kota, kereta regional dan lokal serta layanan intra kota dengan frekuensi tinggi. Diharapkan peran kereta api mencapai setidaknya 10% dari seluruh perjalanan urban.

Pelayanan angkutan KA penumpang jarak menengah secara umum melayani proporsi pasar yang relatif rendah dibandingkan moda jalan. Pelayanan angkutan KA jarak menengah diantaranya Jakarta – Bandung (170 Km), Semarang – Cepu (139 Km), Surabaya – Malang (88 Km), Surabaya – Kertosono (76 Km), Semarang – Solo (109 Km). Tetapi terdapat juga koridor padat pelayanan angkutan KA jarak menengah seperti Jakarta – Cirebon (226 Km), Semarang – Tegal (150 Km), Yogyakarta – Solo (59 Km) yang memiliki load faktor minimal 80% dari kapasitas angkut kereta, bahkan tidak jarang melebihi kapasitas angkut kereta tersebut.

Untuk angkutan penumpang jarak jauh kereta api juga telah semakin tertinggal dengan angkutan transportasi udara. Walaupun secara teknologi kereta api memungkinkan untuk menunjang transportasi jarak jauh (darat) dengan kecepatan tinggi tetapi di Indonesia prasarana dan sarana yang ada belum menunjang hal tersebut. Namun arah kedepan pengembangan kereta cepat saat ini telah ada, yaitu dalam proses pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung.

Untuk mewujudkan transportasi kereta api yang handal dan layak operasi maka diperlukan investasi yang relatif cukup besar untuk meningkatkan daya saing dan daya dukung prasarana dan sarana kereta api, baik melalui pembiayaan Pemerintah (APBN) maupun Swasta. Mengingat transportasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik maka Pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam menyediakan transportasi tersebut khususnya transportasi kereta api baik melalui mekanisme pembiayaan APBN atau APBD, Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) maupun Swasta sepenuhnya.

Dengan perubahan paradigma sehubungan dengan amanat UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maka upaya untuk memajukan perkeretaapian nasional menjadi lebih terbuka. Salah satunya adalah dalam hal investasi di bidang

perkeretaapian yang saat ini sudah mulai ikut sertanya swasta maupun Pemda dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Investasi kereta api yang potensial dikembangkan adalah kereta api cepat Jakarta – Bandung, kereta api bandara yaitu diantaranya KA Bandara Soekarno Hatta, LRT, MRT, Kereta Freeport.

Dengan terbatasnya cadangan energi nasional dan peningkatan kebutuhan energi untuk aktivitas transportasi, bagaimanapun peran perkeretaapian nasional tetap strategis, mengingat beberapa keunggulan yang dimilikinya. Oleh karenanya harus didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana perkeretaapian yang handal dan layak operasi. Untuk itu upaya pengembangan angkutan penumpang dan barang melalui kereta api semakin diperlukan di masa-masa mendatang, baik untuk angkutan jarak jauh, menengah maupun perkotaan (lokal) seperti di kota-kota besar yang menghadapi problema kemacetan lalu lintas.

## **2.2. REALISASI PROGRAM KEGIATAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN**

Sebagai unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian, kegiatan peningkatan keselamatan perkeretaapian yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2015 – 2017 meliputi :

a. Tahun 2015 :

- 1) Pemeriksaan / inspeksi keselamatan perkeretaapian yang dilaksanakan di seluruh Daop dan Divre.
- 2) Pemantauan peningkatan keselamatan lalu lintas perkeretaapian dilaksanakan di 3 tempat yaitu Daop I Jakarta, Daop II Bandung dan Daop III Cirebon.
- 3) Hasil identifikasi terhadap daerah rawan kecelakaan dilaksanakan di Daop II Bandung, Daop VI Yogyakarta dan Daop IX Jember.
- 4) Kegiatan pembinaan keselamatan terhadap konsultan dan kontraktor yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 6 – 8 Oktober 2015.
- 5) Evaluasi bidang keselamatan perkeretaapian dilaksanakan ketika terjadi kecelakaan/ anjlogan kereta api.



- 6) Pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan kereta api dilaksanakan di Daop 4 Semarang, Daop 2 Bandung, Daop 1 Jakarta, Divre I Sumut, Daop 7 Madiun dan Daop 9 Jember.
- 7) Bimbingan teknis analisis kecelakaan KA dilaksanakan tanggal 27 – 30 Juni 2015 di Bekasi.
- 8) Bimbingan teknis penanganan kecelakaan KA dilaksanakan di 2 lokasi yaitu di Bekasi dan Surabaya.
- 9) Rapat koordinasi teknis keselamatan perkeretaapian dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 10 – 11 November 2015.
- 10) Sosialisasi keselamatan perkeretaapian telah dilaksanakan di Madiun dan Malang.
- 11) Pembuatan buletin keselamatan.
- 12) Sertifikasi SDM perkeretaapian  
Penerbitan sertifikat SDM petugas operator perkeretaapian tahun 2015 sebanyak 2502 sertifikat dengan rincian :

a) Tenaga Penguji Prasarana	:	3	sertifikat
b) Tenaga Penguji Sarana	:	1	sertifikat
c) Inspektur Prasarana	:	3	sertifikat
d) Inspektur Sarana	:	1	sertifikat
e) Auditor Perkeretaapian	:	4	sertifikat
f) Awak Sarana Perkeretaapian	:	1160	sertifikat
g) Petugas PPKA	:	431	sertifikat
h) Penjaga Perlintasan (JPL)	:	633	sertifikat
i) Juru Penilik Jalan (JPJ)	:	266	sertifikat
- 13) Pemeriksaan sertifikat awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian dilakukan di seluruh Daerah Operasi.
- 14) Penyuluhan regulasi pidana perkeretaapian dilaksanakan di Bandung dan Semarang.
- 15) Sosialisasi P4GN kepada awak sarana perkeretaapian dilaksanakan di Yogyakarta dan Lampung.
- 16) Pembinaan PPNS Perkeretaapian dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 November 2015 di Bogor.
- 17) Penyidikan dan evaluasi tindak pidana perkeretaapian, 3 kasus kecelakaan.

- 18) Inventarisasi/ pendataan daerah rawan pengrusakan dan pencurian prasarana perkeretaapian (7 lokasi).
- 19) Penegakan hukum dan korwas PPNS Perkeretaapian (5 lokasi).
- 20) Monitoring dan Evaluasi bidang Keselamatan Perkeretaapian.
- 21) Kegiatan kajian / studi kebijakan perkeretaapian.
- 22) Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja dan Laporan Tahunan.
- 23) Kegiatan Ketatausahaan.

b. Tahun 2016 :

- 1) Monitoring bangunan dan pemukiman liar di jalur KA di Daop VI Yogyakarta dan Divre II Sumatra Barat.
- 2) Kegiatan workshop preventif bidang perkeretaapian
- 3) Kegiatan sosialisasi dan promosi keselamatan perkeretaapian
- 4) Peningkatan kemampuan teknis bidang audit dan peningkatan keselamatan
- 5) Pemeriksaan/ inspeksi keselamatan perkeretaapian yang dilaksanakan di seluruh Daop dan Divre.
- 6) Identifikasi daerah rawan kecelakaan
- 7) Kegiatan audit keselamatan perkeretaapian dan safety assessment di seluruh Daop dan Divre.
- 8) Pemantauan keselamatan lalu lintas perkeretaapian di Daerah Operasi Kereta Api.
- 9) In House Training bidang rekayasa struktur jalan rel dan jembatan yang dilaksanakan di Yogyakarta.
- 10) Evaluasi bidang keselamatan pada saat terjadi kecelakaan/ PLH.
- 11) Pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan KA yang dilaksanakan di Daop 2, 4, 5, 6, 8 dan Divre I, III
- 12) Bimbingan teknis analisis kecelakaan KA yang dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat
- 13) Bimbingan teknis penanganan kecelakaan yang dilaksanakan di 3 lokasi (Medan, Palembang dan Bekasi)
- 14) Penyegaran/ peningkatan kompetensi tenaga penguji sarana dan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan di Bekasi.

15)Peningkatan kompetensi teknis inspektur dan auditor perkeretaapian yang dilaksanakan di Bandung.

16)Sertifikasi SDM perkeretaapian

Penerbitan sertifikat SDM petugas operator perkeretaapian tahun 2016 sebanyak 3213 sertifikat dengan rincian :

a) Tenaga Penguji Prasarana	: 27	sertifikat
b) Tenaga Penguji Sarana	: 24	sertifikat
c) Inspektur Prasarana	: 31	sertifikat
d) Inspektur Sarana	: 21	sertifikat
e) Auditor Perkeretaapian	: 6	sertifikat
f) Penguji ASP	: 9	sertifikat
g) Awak Sarana Perkeretaapian	: 1128	sertifikat
h) Petugas PPKA	: 323	sertifikat
i) Penjaga Perlintasan (JPL)	: 273	sertifikat
j) Juru Penilik Jalan (JPJ)	: 1092	sertifikat
k) Train watcher	: 279	sertifikat

Tahun 2017 :

- 1) Kegiatan penutupan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera
- 2) Kegiatan workshop preventif bidang perkeretaapian
- 3) Kegiatan sosialisasi dan promosi keselamatan perkeretaapian
- 4) Bimbingan teknis perpotongan atau persinggungan perkeretaapian
- 5) Peningkatan kemampuan teknis bidang audit dan peningkatan keselamatan
- 6) Pemeriksaan/ inspeksi keselamatan perkeretaapian yang dilaksanakan di seluruh Daop dan Divre.
- 7) Identifikasi daerah rawan kecelakaan
- 8) Kegiatan audit keselamatan perkeretaapian dan safety assessment di seluruh Daop dan Divre.
- 9) Pemantauan keselamatan lalu lintas perkeretaapian di Daerah Operasi Kereta Api.
- 10)Evaluasi bidang keselamatan pada saat terjadi kecelakaan/ PLH.
- 11)Pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan KA yang dilaksanakan di semua Daop dan Divre.

- 12) Bimbingan teknis analisis kecelakaan KA yang dilaksanakan di Jawa Barat dan Banten
- 13) Bimbingan teknis pemeriksaan kecelakaan yang dilaksanakan di 4 lokasi (Jakarta, Semarang, Bandung dan Banten)
- 14) Penyegaran/ peningkatan kompetensi tenaga penguji sarana dan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan di Bekasi.
- 15) Peningkatan kompetensi teknis inspektur dan auditor perkeretaapian yang dilaksanakan di Serpong.
- 16) Peningkatan kompetensi teknis SDM perkeretaapian
  - a) Diklat pembentukan tenaga penguji sarana dan prasarana di API Madiun
  - b) Diklat pembentukan Auditor perkeretaapian di Yogyakarta
- 17) Sertifikasi SDM perkeretaapian

Penerbitan sertifikat SDM petugas operator perkeretaapian tahun 2017 sebanyak 6169 sertifikat dengan rincian :

a) Tenaga Penguji Prasarana	: 9	sertifikat
b) Tenaga Penguji Sarana	: 14	sertifikat
c) Awak Sarana Perkeretaapian	: 1688	sertifikat
d) Petugas PPKA	: 559	sertifikat
e) Penjaga Perlintasan (PJL)	: 425	sertifikat
f) Juru Penilik Jalan (JPJ)	: 230	sertifikat
g) Tenaga Perawatan Prasarana	: 1307	sertifikat
h) Tenaga Perawatan Sarana	: 1022	sertifikat
i) Tenaga Pemeriksa Sarana	: 915	sertifikat

## PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Permasalahan yang sedang dan masih akan dihadapi oleh transportasi perkeretaapian pada masa yang akan datang adalah masih rendahnya share angkutan penumpang maupun barang. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya kapasitas angkut dan kapasitas lintas serta masih kurangnya fasilitas keterpaduan dengan moda lain.

Demikian pula pada bidang keselamatan perkeretaapian, pada sarana perkeretaapian, terbatasnya kapasitas angkut kereta api saat ini diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan jumlah armada terutama untuk kereta api ekonomi. Dengan

program peningkatan aksesibilitas angkutan KA diharapkan ketersediaan armada KA dapat ditingkatkan diantaranya dengan pengadaan sarana KA baru serta modifikasi. Adapun pada prasarana perkeretaapian, kondisi fisik secara umum dan bertahap mengalami perbaikan, namun di beberapa lokasi perlu penanganan serius khususnya daerah yang diidentifikasi rawan kecelakaan dan banjir/longsor.

Disamping dari permasalahan tersebut di atas, permasalahan teknis lainnya adalah :

- Masih sering terjadinya kecelakaan kereta api
- Masih banyaknya perlintasan sebidang dan perlintasan liar yang rawan kecelakaan.
- Masih banyaknya masyarakat yang menempati / bertempat tinggal dekat jalur kereta api.
- Masih adanya upaya-upaya pengrusakan atau pencurian fasilitas perkeretaapian

Terkait dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan keselamatan dilakukan perbaikan kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian yang ada selain pembangunan-pembangunan baru, optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemeriksaan keselamatan pada sarana, prasarana dan fasilitas lain, peningkatan kompetensi dan kecakapan SDM, penertiban pelanggaran dan penyidikan, pengujian dan sertifikasi kelaikan operasi sarana perkeretaapian serta penataan kelembagaan organisasi keselamatan perkeretaapian. Diharapkan dengan terlaksananya program tersebut akan meningkatkan keselamatan dan sekaligus kualitas pelayanan sehingga pangsa pasar angkutan KA dapat ditingkatkan.

### 3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

#### 3.1. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Presiden adalah :

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015 – 2020 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015 – 2020 adalah :

***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian  
Berlandaskan Gotong Royong”***

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 (tujuh) kiat jati diri sebagai negara maritim;

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

#### 3.2. TUJUAN

Tujuan pembangunan perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan program peningkatan manajemen keselamatan bidang perkeretaapian.
2. Mewujudkan peningkatan kemampuan teknis SDM dalam pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian.

3. Mewujudkan peningkatan penegakan hukum di bidang perkeretaapian.
4. Mewujudkan penerapan kebijakan, peraturan dan pedoman teknis di bidang keselamatan perkeretaapian.
5. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan kinerja kegiatan penunjang direktorat.
6. Mewujudkan peran serta dan kesadaran masyarakat akan keselamatan perkeretaapian.

### 3.3. TARGET FISIK DAN PENDANAAN KEGIATAN 2020-2024

Program dan kegiatan periode tahun 2020-2024 diarahkan dalam rangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai, peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran. Program dan kegiatan didasarkan pada tugas-tugas unit kerja yang melekat pada struktur organisasi. Program dan kegiatan ini telah menetapkan target yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut pada masing-masing kegiatan untuk setiap tahun anggaran untuk setiap kelompok program kegiatan.

Berikut tabel target fisik program kegiatan tahun 2020-2024 bidang keselamatan perkeretaapian.

**Tabel 1** Target Fisik Program (Outcome)  
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 2020-2024

ASPEK	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TH 2020
<b>Keselamatan dan Keamanan</b>	Ratio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian	0.55 ratio kejadian / 1 juta Km	0.55 ratio kejadian / 1 juta Km
	Jumlah kegiatan bimtek dan supervisi peningkatan keselamatan, audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan perkeretaapian serta pencegahan dan penegakkan hukum	1 Laporan	27 Laporan
	Jumlah pengamanan/ penanganan pelintasan sebidang	1 lokasi	2 lokasi
	Jumlah penutupan perlintasan	4 perlintasan	218 perlintasan

ASPEK	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TH 2020
	sebidang yang telah ada flyover/ underpass		
	Tingkat ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM Perkeretaapian	29 unit	124 unit
	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	14.44 Ratio gangguan/ 1 juta km	6.7 Ratio gangguan/ 1 juta km
	Jumlah sertifikat kompetensi/ kecakapan SDM Perkeretaapian	1290 sertifikat	10384 sertifikat
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi SDM dan akreditasi kelembagaan	3 Laporan	6 Laporan
<b>Perumusan Regulasi dan Kebijakan</b>	Jumlah kajian kebijakan/ peraturan di bidang keselamatan perkeretaapian	1 Dokumen	2 Dokumen
	Studi Bidang keselamatan perkeretaapian	5 Dokumen	7 Dokumen
<b>Good Governance dan Clean Government</b>	Jumlah kegiatan administrasi direktorat	9 Laporan	10 Laporan
	Prosentase penyerapan anggaran	100%	100%
	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan perkeretaapian	5 Laporan	7 Laporan
	Jumlah kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	5 Paket	7 Paket

Berikut tabel kebutuhan keuangan program kegiatan tahun 2015 – 2020 bidang keselamatan perkeretaapian :

**Tabel 2** Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Perkeretaapian 2015-2020 (Milyar Rp)

PROGRAM	ALOKASI (Rp. Milyar)					TOTAL
	2015	2017	2017	2019	2020	
<b>Bidang Keselamatan Perkeretaapian</b>	167.3	175.8	184.5	192.8	201.5	<b>921.9</b>



## 4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

### 4.1. SASARAN TAHUN 2021

Sasaran pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2021 bidang keselamatan perkeretaapian adalah:

1. Meningkatnya peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian.
2. Meningkatnya manajemen keselamatan perkeretaapian.
3. Meningkatnya kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat.
5. Terwujudnya peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan Perkeretaapian.
6. Terwujudnya budaya selamat di dalam masyarakat.

### 4.2. STRATEGI TAHUN 2021

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan di bidang keselamatan perkeretaapian tersebut di atas maka dilakukan pendekatan (strategi), yaitu :

1. Strategi peningkatan peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian dilakukan melalui penyusunan pedoman dan kebijakan di bidang keselamatan dan SDM Perkeretaapian.
2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatkan manajemen keselamatan perkeretaapian dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan sistem informasi keselamatan perkeretaapian, perencanaan keselamatan perkeretaapian, pengorganisasian manajemen keselamatan perkeretaapian, sosialisasi kebijakan/ peraturan keselamatan perkeretaapian, penindakan terhadap pelanggaran hukum terutama terkait dengan aspek keselamatan.
3. Strategi peningkatan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian dilakukan melalui perawatan dan peremajaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4. Strategi untuk mencapai sasaran peningkatan jumlah kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat dilakukan melalui kegiatan pembinaan teknis dan sertifikasi kecakapan SDM perkeretaapian.

5. Strategi peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan administratif dan laporan kinerja pertanggung jawaban kegiatan serta percepatan penyelesaian penyusunan kajian/ studi kebijakan perkeretaapian.
6. Strategi peningkatan peran serta masyarakat di dalam membentuk budaya keselamatan melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum.

#### **4.3. ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021**

Arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2021 meliputi:

1. Melaksanakan penyiapan dan penguatan regulasi berupa pedoman teknis di bidang keselamatan dan SDM Perkeretaapian.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang audit keselamatan, analisis penanganan kecelakaan, kompetensi dan sertifikasi SDM, penyidikan dan penegakan hukum perkeretaapian serta kegiatan pendukung ketatausahaan dan administrasi.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengujian, perawatan dan peremajaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4. Meningkatkan penyediaan dan peningkatan kecakapan teknis SDM perkeretaapian.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan direktorat.
6. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum kepada masyarakat.
7. Menyiapkan tata hubungan kerja Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dtjen Perkeretaapian.

#### **4.4. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2021**

Program pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, meningkatkan keahlian dan kecakapan SDM perkeretaapian, penyidikan dan penegakan hukum di bidang perkeretaapian.

Secara rinci program pembangunan tahun 2021 diprioritaskan pada :

1. Peningkatan dan rekayasa keselamatan perkeretaapian.
2. Peningkatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian.
3. Peningkatan Pemeriksaan dan Analisis kecelakaan.

4. Peningkatan pengujian, perawatan dan peremajaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
5. Peningkatan Pengembangan SDM Perkeretaapian.
6. Penyidikan dan penegakan hukum bidang perkeretaapian.
7. Peningkatan kinerja administrasi dan kajian kebijakan perkeretaapian.
8. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang keselamatan perkeretaapian.

#### 4.5. KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdapat beberapa capaian output di Bidang Keselamatan Perkeretaapian untuk tahun 2021, adapun capaian dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 3** Capaian Output Bidang Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Akreditasi Lembaga	1	LEMBAGA	462.952.000
2	Sertifikasi Profesi dan SDM	1	SERTIFIKAT	3.654.803.000
3	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	1	NSPK	13.810.146.000
4	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	1	LAYANAN	20.276.769.000
5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	LAYANAN	13.003.039.000
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	LAPORAN	7.273.730.000
7	Program Dukungan Manajemen	1	PROGRAM	5.207.500.000
8	Layanan Perkantoran	1	LAYANAN	1.287.340.000
9	Layanan Umum	1	LAYANAN	3.220.213.000
10	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	LAYANAN	699.947.000

### a. Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian yang merupakan upaya dalam peningkatan keselamatan perkeretaapian. Untuk itu dalam upaya mewujudkan peningkatan keselamatan dilakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut

**Tabel 4** Target Fisik Program Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	- Penyusunan Pedoman Rekayasa Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perkeretaapian Wilayah Sumatera	1	Laporan	1,125,378,000
	- Penyusunan Pedoman Rekayasa Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat	1	Laporan	983,872,000
	- Penyusunan Pedoman Rekayasa Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perkeretaapian Wilayah Sumatera	1	Laporan	1,091,609,000
	- Penyusunan Pedoman Rekayasa Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perkeretaapian Wilayah Lampung	1	Laporan	1,006,198,000
	- Review Peraturan Menteri Perhubungan No.94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara	1	Laporan	525,000,000
	- Penyusunan Pedoman Integrasi Jalur Kereta Api Berdasarkan Aspek-Aspek Keselamatan Wilayah Jabodetabek dan Lintas Utara	1	Laporan	2,174,320,000
	- Panduan Evaluasi Serta Rencana Rekayasa Dan Perancangan Perkembangan Jalur Kereta Api Wilayah Jawa	1	Laporan	2,174,320,000
2	Bimbingan Teknis Rekayasa Keselamatan dan Operasional	1	Laporan	668.804.000
3	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	1	Laporan	730.069.000
4	Sosialisasi dan Promosi Keselamatan Terhadap Masyarakat dan Instansi Terkait	1	Laporan	1.517.112.000
5	Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	1	Laporan	282.992.000
6	Workshop Rekayasa di Bidang Perkeretaapian	1	Laporan	452.604.000

## b. Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, aspek keselamatan perkeretaapian merupakan hal yang menjadi prioritas. Keselamatan perkeretaapian ditunjang oleh semua aspek dalam penyelenggaraan perkeretaapian, yaitu aspek sarana, prasarana, aspek operasional dan aspek SDM. Penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian wajib melakukan pemeriksaan dan perawatan agar sarana dan prasarana perkeretaapian tetap dalam kondisi yang laik operasi. Dalam aspek operasional dan aspek SDM, penyelenggara wajib melakukan pembinaan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor keselamatan dalam penyelenggaraan jasa transportasi perkeretaapian merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah. Untuk itu dalam upaya mewujudkan peningkatan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 5** Target Fisik Program Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Audit Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	1.704.701.000
2	Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	1.558.359.000
3	Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan	1	LAPORAN	287.923.000
4	Inspeksi dan Penilaian Keselamatan	1	LAPORAN	2.290.823.000
5	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	1	LAPORAN	308.645.000
6	Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	1	LAPORAN	404.145.000
7	Monitoring Pelaksanaan K3 Kontruksi, Perawatan dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	541.930.000

### c. Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Terkait dengan keselamatan perkeretaapian, program pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api adalah dalam rangka upaya pencegahan agar kecelakaan tidak terulang lagi atau meminimalisasi tingkat kecelakaan dengan menganalisis sebab-sebab kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Dari hasil analisis penanganan kecelakaan diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga zero accident dapat terwujud.

**Tabel 6** Target Fisik Program Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	- Kajian Penyusunan Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api untuk Angkutan Penumpang dan Barang pada Lintas	1	LAPORAN	1,702,838,000
	- Kajian Penyusunan Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api untuk Angkutan Penumpang dan Barang pada Lintas	1	LAPORAN	2,174,320,000
2	Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	691.341.000
3	FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	266.933.000
4	Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA	1	LAPORAN	473.645.000
5	Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	1	LAPORAN	921.875.000

### d. Peningkatan Kemampuan dan Kualifikasi Keahlian SDM Perkeretaapian.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM baik operator maupun regulator melalui kegiatan pelatihan teknis dan sertifikasi mempunyai sasaran peningkatan kemampuan dan kualifikasi keahlian. Sumber daya manusia, pada operator yang langsung menangani prasarana dan sarana kereta api merupakan faktor utama dalam pengoperasian perkeretaapian. Ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana yang ada tidak akan dapat secara efektif memberikan pelayanan kereta api yang baik dan aman tanpa didukung oleh SDM yang terdidik, terlatih dan bertanggung jawab.

Untuk realisasi peningkatan kemampuan SDM Perkeretaapian tersebut diprogramkan kegiatan seperti pada tabel berikut :

**Tabel 7** Target Fisik Program Sertifikasi SDM dan Akreditasi Keembagaan

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	- Pembangunan Sistem Informasi Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	1	LAPORAN	556.000.000
2	Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	1	LAPORAN	177.420.000
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	285.532.000
4	Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	1,979,429,000
5	Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	392.076.000
6	Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	1.283.298.000
7	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	1	LAPORAN	181.340.000
8	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Akreditasi	1	LAPORAN	114.951.000
9	Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	1,469,428,000

#### e. Pencegahan dan Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian antara lain adalah penegakan hukum di bidang perkeretaapian yang mengarah pada peningkatan keselamatan melalui kegiatan penyuluhan pedoman tindak pidana perkeretaapian, penerapan hukum / penyidikan terhadap kecelakaan kereta api, penyidikan terhadap calo tiket kereta api, penertiban terhadap penumpang yang naik di kabin masinis, di lokomotif, di atap kereta api dan di tempat lain yang peruntukannya bukan untuk penumpang.

Untuk realisasi kegiatan tersebut diprogramkan kegiatan pada tabel berikut:

**Tabel 8** Target Fisik Program Pencegahan dan Penegakan Hukum

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	1	LAPORAN	386,598,000
2	Pelaksanaan Korwas Penegakkan Hukum di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	390,448,000
3	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Transportasi Kereta Api	1	LAPORAN	1,078,649,000
4	Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	1,463,141,000
5	Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	1	LAPORAN	587,330,000
6	Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	169,530,000
7	Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	278,261,000
8	Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	1	LAPORAN	634,495,000

**f. Program Peningkatan Kinerja Kegiatan Administrasi dan Kajian Kebijakan Perkeretaapian.**

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, disamping pelaksanaan kegiatan teknis diperlukan kegiatan administratif untuk menunjang kinerja penyelenggaraan perkantoran dan pertanggungjawaban kegiatan.

**Tabel 9** Target Fisik Program Peningkatan Kinerja Kegiatan Administrasi dan Kajian Kebijakan Perkeretaapian

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	716,988,000
2	Administrasi Ketatausahaan	1	LAPORAN	583,908,000
3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2021 serta RKT 2022, dan LAPTAH 2020 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan	3	LAPORAN	233.042.000



## **5. PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara Pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh mendukung program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.